

Materi Sulit pada UN Mata Pelajaran Bahasa Indonesia bagi Siswa SMP di Provinsi D. I. Yogyakarta*)

Oleh : Badrun Kartowagiran**)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap (1) materi sulit bagi siswa SMP di Provinsi D.I. Yogyakarta pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, (2) ada tidaknya perbedaan jumlah materi sulit pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bila dilihat dari daerah yang ada di D.I. Yogyakarta, dan (3) ada tidaknya perbedaan jumlah materi sulit pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bila ditinjau dari tahun penyelenggaraan UN (2007, 2008, 2009).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif. Data utama yang digunakan pada penelitian ini adalah daya serap UN mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2007, 2008, dan 2009 yang merupakan dokumentasi Puspendik Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya untuk wilayah Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) materi paling sulit dari tahun-ke-tahun untuk bahasa Indonesia adalah menentukan gagasan utama dari suatu tajuk, (2) ada perbedaan jumlah materi sulit dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ditinjau dari 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di Yogyakarta dengan urutan dimulai yang paling banyak sampai yang paling sedikit, yaitu: Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, dan (3) dengan asumsi tingkat kemampuan siswa peserta UN dari tahun ke tahun sama, maka materi sulit UN Bahasa Indonesia tahun 2008 jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan materi sulit tahun 2007 dan tahun 2009.

Kata kunci: materi sulit

*) Judul penelitian kelompok: Badrun Kartowagiran, Amat Jaedun, Heri Retnowati ditampilkan dengan izin anggota Tim Peneliti lainnya

***) Dosen Fakultas Teknik dan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan produk dari lembaga pendidikan, sehingga secara tidak langsung kualitas pendidikan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu lembaga pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada era global ini.

Ulrich (1997) berpendapat bahwa globalisasi adalah dunia kompetisi, salah satu di antaranya adalah kompetisi kualitas sumber daya manusia. Negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul akan mampu berperan pada era global ini. Oleh karena itu semua negara melalui lembaga pendidikan terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sampai saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia masih memerlukan perhatian tinggi. Pada tahun 2004 hasil penelitian *United Nation for Development Programme* (UNDP) dalam Buletin Puspendik (2007) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 111 dari 117 negara dalam pencapaian *Human Development Index* (HDI). Hasil survei yang dilakukan oleh *Program for International Student Assessment* (PISA) tahun 2006 yang menilai kinerja siswa usia 15 tahun di bidang sains, matematik, dan membaca, dari 57 negara yang disurvei, Indonesia menduduki ranking ke 52 untuk sains, 48 untuk membaca, dan ranking 51 untuk matematik. Namun perlu diakui bahwa tidak semua siswa Indonesia berprestasi buruk. Ada beberapa siswa yang berprestasi secara gemilang, mampu meraih medali emas pada olimpiade sains dan matematik. Bahkan, pada akhir tahun 2005 siswa SMP di Indonesia menunjukkan prestasi yang mengagumkan. Pada *International Junior Science Olympiade* (IJSO) ke dua pada tanggal 4 – 13 Desember 2005 Indonesia meraih 6 medali emas, 4 perak, dan 2 medali perunggu.

Dengan adanya kualitas pendidikan di Indonesia yang belum begitu menggembirakan, maka dalam era otonomi dan globalisasi ini, usaha peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, legislatif pusat, legislatif daerah, media massa cetak maupun elektronik harus bekerja secara

sinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dalam makna yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Penentuan program peningkatan kualitas pendidikan memerlukan informasi kualitas pendidikan pada suatu saat tertentu dan kinerja pengelola bidang pendidikan. Informasi ini diperoleh melalui evaluasi terhadap program pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini. Salah satu tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru. Hasil evaluasi ini kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk program peningkatan kualitas pendidikan.

Evaluasi belajar tahap akhir secara nasional yang diselenggarakan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atas penunjukan Pemerintah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah (BSNP, 2009). Salah satu tujuan ujian nasional (UN) adalah untuk melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum dicapai, selanjutnya, informasi ini digunakan untuk perbaikan suatu program.

Menurut Djemari Mardapi (2008), evaluasi belajar adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok. Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong pendidik untuk mengajar lebih baik dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Jadi evaluasi memberikan informasi bagi kelas dan pendidik untuk meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Informasi yang digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran harus memiliki kesalahan sekecil mungkin.

Sementara itu, Jahja Umar (2000) menjelaskan bahwa evaluasi berasal dari kata kerja "*to evaluate*" yang salah satu artinya adalah melihat/menimbang apakah suatu program yang telah selesai dikerjakan menghasilkan seperti yang telah ditetapkan sebagai tujuan program tersebut. Ini berarti bahwa evaluasi mengandung *judgment* terhadap nilai atau implikasi hasil pengukuran.

Pengukuran itu sendiri merupakan proses pemberian angka pada subjek, objek harus menggunakan aturan-aturan tertentu. Artinya, orang yang akan memberi angka pada subjek, objek, ataupun kejadian harus mengikuti kaidah-

kaidah tertentu agar angka yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kaidah ini akan mengurangi kesalahan pengukuran.

Pengukuran dapat dilakukan melalui tes dan dapat pula tidak melalui tes. Menurut Djemari Mardapi (2008), tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah. Tes juga diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes.

Ahli lain, Jahja Umar (2000), menjelaskan tes adalah pengukuran karakteristik seseorang, khususnya kemampuan atau pengetahuannya di bidang tertentu, dengan cara menyajikan stimulus (butir soal), yang kemudian direspons oleh orang tersebut. Atas jawaban (respons) yang diperoleh itu lalu ditetapkan kedudukan orang tersebut pada suatu skala ukuran yang ditentukan. Sementara itu, non-tes adalah pengukuran suatu obyek ataupun subyek yang sifatnya non-potensi, seperti tinggi badan, berat badan, jumlah kursi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, hasil pengukuran ini digunakan untuk melakukan penilaian dan/atau evaluasi. Terkait dengan penilaian dan evaluasi, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa ada kesamaan pengertian antara evaluasi dan penilaian, namun para ahli lainnya menganggap bahwa kedua hal itu berbeda. DiRanna, dkk (2008) menjelaskan penilaian adalah penafsiran skor hasil pengukuran yang implikasinya dikenakan pada orang perorang. Nitko (1996) menjelaskan bahwa penilaian adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan, kurikulum, program pendidikan, dan kegiatan belajar siswa. Sependapat dengan Nitko, Linn dan Gronlund (1995) menjelaskan bahwa penilaian merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan seberapa jauh tujuan instruksional telah dicapai siswa.

Terkait dengan penilaian, Djemari Mardapi (2008) menjelaskan bahwa penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih jauh Djemari Mardapi menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran dan sistem penilaiannya. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan (UU RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 ps1 57).

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah (PP RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 63). Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian di atas digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran (Pasal 64, PP RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Penilaian oleh pendidik inilah yang oleh DiRanna, dkk (2008) disebut dengan *assessment-centered teaching*. Penilaian oleh pendidik harus menitik beratkan pada penilaian kelas yakni penilaian yang berkesinambungan. Penilaian jenis ini harus mampu memberikan umpan balik pada guru dan siswa. Dengan umpan balik ini diharapkan mampu mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian ini digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (Pasal 65, PP RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (Pasal 66, PP RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Mencermati pendapat para ahli di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa perbedaan antara penilaian dan evaluasi itu terletak pada pemanfaatan

informasi. Apabila informasi itu digunakan untuk mengambil kebijakan pada tingkat mikro, seperti untuk mengatakan seseorang itu lulus atau tidak lulus maka kegiatan itu disebut penilaian. Sebaliknya, apabila informasi itu digunakan untuk menimbang baik-buruk dan atau menentukan keadaan sekelompok orang atau program maka kegiatan itu disebut dengan evaluasi.

Salah satu bentuk evaluasi yakni ujian nasional. Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (POS Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009). Untuk melaksanakan tugasnya, yakni penilaian hasil belajar, Pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan untuk menyelenggarakan ujian nasional (Pasal 67, PP RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Untuk melaksanakan pasal-pasal di atas Mendiknas menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008/2009 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMALB dan SMK. Teknis pelaksanaan UN SMP/MTs/SMPLB mengacu kepada prosedur operasional standar (POS Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009).

Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dari tujuan UN dapat dimengerti bahwa UN berfungsi sebagai: (1) alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, (2) pendorong peningkatan mutu pendidikan, (3) bahan pertimbangan dalam menentukan tamat belajar dan predikat prestasi siswa, dan (4) bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari fungsi (1) diharapkan bahwa dengan diadakannya UN maka mutu pendidikan secara nasional dapat dikendalikan. Hal ini dapat dimengerti karena dengan adanya UN maka mutu setiap sekolah akan diketahui kemudian diberi perlakuan. Hal yang perlu diingat adalah, jangan sampai hasil UN ini hanya digunakan untuk mengelompokkan sekolah yang mutu dan sekolah yang tidak mutu semata. Apabila hal ini terjadi maka sekolah yang termasuk kelompok rendah akan semakin rendah. Hal ini senada dengan hasil penelitian di Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang dengan responden orang tua siswa, kepala sekolah, guru, guru bimbingan konseling, dan siswa yang dilakukan oleh

LeTendre, dkk (2003). Dalam penelitian yang menggunakan 199 responden dari Jerman, 247 dari Jepang, dan 271 orang dari Amerika Serikat ini menemukan bahwa penempatan siswa pada kelompok rendah dapat dianggap sebagai pembuatan sampah pendidikan bagi siswa.

Fungsi ke (2) dari UN adalah sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan. Diharapkan dengan mengikuti UN lambat laun kualitas sekolah itu akan meningkat. Hal inipun harus dilakukan dengan hati-hati, karena apabila sekolah itu merasa tertekan untuk meningkatkan kualitasnya (berkompetisi dengan tekanan) maka yang terjadi justru sebaliknya, hasil belajar siswa justru menurun. Penelitian Ladd dan Fiske (2003) di New Zealand yang menggunakan 181 kepala sekolah dan 361 guru sebagai responden menemukan bahwa 49,5% responden menganggap model kompetisi dengan tekanan berpengaruh positif terhadap kualitas belajar siswa, 40% menganggap tidak berpengaruh, dan 10,5% menganggap berpengaruh negatif terhadap kualitas belajar siswa.

Fungsi ke (3) dari UN adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tamat belajar dan predikat prestasi siswa. Dengan cara demikian, predikat prestasi siswa dapat ditentukan secara akurat. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi ketidak sesuaian antara predikat yang disandang oleh siswa dengan kemampuan yang sebenarnya. Jangan sampai kemampuan yang tertera dalam surat keterangan 8, namun kemampuan sebenarnya hanya 5.

Fungsi ke (4) dari UN adalah sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan Ebtanas yang berfungsi sebagai alat seleksi siswa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena tes dalam Ebtanas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diajarkan sedangkan tes dalam seleksi dimaksudkan untuk mengetahui potensi calon siswa untuk mengikuti pelajaran di sekolah yang dipilihnya.

Butir soal dalam Ebtanas harus mampu membedakan antara siswa yang menguasai dan tidak menguasai materi yang diujikan, sedangkan butir soal dalam ujian seleksi harus mampu memilih secara tepat siswa yang diterima dan yang ditolak. Jangan sampai siswa yang diterima tetapi tidak mampu dan siswa yang ditolak justru siswa yang sebenarnya mampu melanjutkan ke pendidikan yang dipilihnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara ideal soal UN itu berbeda dengan soal seleksi. Perubahan fungsi UN dari alat seleksi menjadi

salah satu bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah tepat.

Dengan memperhatikan tujuan dan kegunaan UN tersebut, nampak bahwa program UN tersebut merupakan program yang penting, dan mengingat bahwa program itu “baru pertama” akan dilaksanakan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perhatian tersebut dapat berupa evaluasi terhadap pelaksanaan UN sehingga dari hasil evaluasi dapat digunakan untuk penyempurnaan program yang akan datang.

Sesuai dengan POS, UN diselenggarakan oleh Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah. Unsur-unsur, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing penyelenggara terdapat pada POS UN SMP/MTs/SMPLB dan SMK Tahun 2008/2009. Pada POS tersebut dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara UN SMP/MTs/SMPLB dan SMK Tahun 2008/2009.

Uraian di atas menggambarkan bahwa UN sangat penting artinya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat terlaksana manakala pelaksanaan UN di lapangan sesuai dengan POS. Ini berarti bahwa kepemilikan dan pemahaman sekolah terhadap Permen Diknas RI No. 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional, POS UN yang ditetapkan oleh BSNP sangat penting bagi sekolah pelaksana UN.

Untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB mata pelajaran yang UN kan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (POS Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009). Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ada 25 materi yang diujikan, Bahasa Inggris ada 25 materi, IPA ada 20 materi, dan mata pelajaran IPA ada 20 materi yang diajarkan. Dari sekian materi yang diujikan, tidak semua materi dikuasai atau dapat dikerjakan dengan baik oleh peserta didik.

Hasil penelitian Safari (2008) tentang Materi sulit pada UN 2006-2007 bagi siswa SMP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menunjukkan bahwa penguasaan materi yang di UN kan termasuk kategori sedang. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, penguasaan materi pelajaran Bahasa Indonesia yang kurang dari 45% (kategori kurang sekali) untuk siswa SMPN ada 11 butir (22%), sedangkan untuk siswa swasta ada 10 butir (20%). Penguasaan materi 45,1% - 55% (kategori kurang) untuk siswa SMPN ada 15 butir (30%), sedangkan untuk siswa

SMP swasta ada 12 butir (24%). Jadi penguasaan materi Bahasa Indonesia masuk kategori kurang sekali. (<45%) dan kurang (45,1 – 55%) untuk siswa SMPN adalah lebih banyak (22% dan 30%) dibandingkan dengan penguasaan materi untuk siswa SMP Swasta (20% dan 24%).

Kedua, penguasaan materi pelajaran Bahasa Inggris yang kurang dari 45% (kategori kurang sekali) untuk siswa SMPN ada 9 butir (18%), sedangkan untuk siswa swasta ada 4 butir (8%). Penguasaan materi 45,1% - 55% (kategori kurang) untuk siswa SMPN ada 20 butir (40%), sedangkan untuk siswa SMP swasta ada 14 butir (28%). Jadi penguasaan materi Bahasa Inggris masuk kategori kurang sekali. (<45%) dan kurang (45,1 – 55%) untuk siswa SMPN adalah lebih banyak (18% dan 40%) dibandingkan dengan penguasaan materi untuk siswa SMP Swasta (8% dan 28%).

Ketiga, penguasaan materi pelajaran Matematika yang kurang dari 45% (kategori kurang sekali) untuk siswa SMPN ada 2 butir (6,7%), dan secara kebetulan, untuk siswa swasta juga ada 2 butir (6,7%). Penguasaan materi 45,1% - 55% (kategori kurang) untuk siswa SMPN ada 7 butir (23,33%), sedangkan untuk siswa SMP swasta ada 5 butir (16,67%). Jadi penguasaan materi Matematika kategori kurang sekali. (<45%) untuk siswa SMPN dan siswa SMPN Swasta adalah sama, yaitu 2 butir (6,67%), sedangkan untuk kategori kurang (45,1 – 55%) untuk siswa SMPN lebih banyak (23,3%) dibandingkan dengan penguasaan materi siswa SMP Swasta.

Apabila hasil penelitian materi sulit dimanfaatkan maka kemungkinan besar ujian nasional mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Kenyataannya belum seperti yang diharapkan, walaupun UN ini telah diselenggarakan hampir 20 tahun, namun hasilnya belum begitu menggembirakan. Sebagai gambaran, hasil UN SMP secara nasional tahun 2008 menunjukkan pencapaian skor Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA masing-masing adalah 7,00, 6,80, 6,69, dan 7,00 (Balitbang, Depdiknas, 2008). Ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan seluruh komponen bangsa masih harus bekerja lebih keras agar peningkatan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan UN itu segera tercapai. Lebih-lebih UN untuk jenjang SMP karena hasilnya digunakan untuk pertimbangan masuk ke pendidikan yang lebih tinggi sehingga para siswa mengerjakan soal UN dengan sungguh-sungguh.

Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia juga belum menunjukkan hasil yang maksimum. Dari 33 provinsi yang ada di

Indonesia, Provinsi D.I. Yogyakarta berada di urutan ke empat, di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pencapaian skor UN siswa SMP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA masing-masing adalah 7,86, 6,56, 6,18, dan 6,30 (Balitbang, Depdiknas, 2008). Tampak bahwa dari empat mata pelajaran yang di UN –kan, hanya satu (1) mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia yang skor pencapaiannya di atas skor nasional, tiga (3) lainnya ada di bawah skor nasional.

Sehubungan dengan hal di atas, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pembinaan agar skor pencapaian UN Provinsi D.I. Yogyakarta, khususnya pelajaran Bahasa Indonesia agar rerata skornya di atas rata-rata nasional bahkan meningkat. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi materi sulit pada mata pelajaran yang di UN kan bagi siswa SMP di Provinsi D.I. Yogyakarta. Selanjutnya, hasil identifikasi materi sulit ini digunakan untuk melakukan pembinaan kemampuan guru.

Selaras dengan masalah yang akan dipecahkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap mengungkap: (1) materi sulit bagi siswa SMP di Provinsi D.I. Yogyakarta pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, (2) ada tidaknya perbedaan jumlah materi sulit pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bila dilihat dari daerah yang ada di D.I. Yogyakarta, dan (3) ada tidaknya perbedaan jumlah materi sulit pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bila ditinjau dari tahun penyelenggaraan UN (2007, 2008, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori survei eksploratif, yakni penelitian yang mencoba mengeksplorasi dan mendeskripsikan materi sulit bagi siswa SMP di Provinsi D.I. Yogyakarta pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2006 - 2008. Materi sulit yang teridentifikasi dalam penelitian ini, selanjutnya digunakan untuk melakukan pembinaan kemampuan guru SMP di Provinsi D.I. Yogyakarta yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini populasi sama dengan sampel, yakni semua materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diujikan secara nasional pada tahun 2006 - 2008 kepada siswa SMP di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang merupakan hasil analisis ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2006 – 2008 yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan

(Puspendik), Balitbang, Depdiknas. Data dikumpulkan dengan cara mencermati dan memilih materi yang sulit menurut siswa SMP di Provinsi D.I. Yogyakarta. Materi dianggap sulit bila daya serapnya hanya mencapai 65% atau kurang (BSNP, 2008).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, ditampilkan dalam bentuk persentase dan tabel frekuensi. Dari hasil analisis data dengan statistik deskriptif ini selanjutnya diinterpretasikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Materi Sulit UN 2007 – 2009

1. Tahun 2007

Pada butir-butir soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia, proporsi menjawab benar untuk kemampuan menentukan gagasan utama suatu tajuk adalah sebesar 47,11%. Proporsi tersebut menempati proporsi yang paling rendah bila dibandingkan dengan proporsi menjawab benar pada tema lain yang ada dalam butir soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk tema menyusun kritikan berdasarkan bacaan mempunyai proporsi menjawab benar sebesar 52,32%. Untuk tema menyusun kamus kecil mempunyai proporsi 55,44, tema menyusun majas pada puisi mempunyai proporsi 57,18, tema menyusun pernyataan yang sesuai isi peta mempunyai proporsi 58,32, tema menentukan kalimat fakta dalam paragraf mempunyai proporsi 60,12, tema menyusun paragraf pengantar sesuai judul karya tulis mempunyai proporsi 60,53, tema menyunting kalimat menjadi efektif mempunyai proporsi 61,25, tema menentukan jenis konflik pada cerita mempunyai proporsi 61,8, tema menyimpulkan isi tajuk mempunyai proporsi 63,48, tema menentukan penyajian dua teks berita mempunyai proporsi 63,48 dan yang terakhir adalah tema menentukan kalimat pendapat mempunyai proporsi menjawab benar sebesar 64,45. Proporsi-proporsi tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Proporsi menjawab benar butir soal mapel Bahasa Indonesia UN 2007

No	Pb/Spb/Tema/Sub	Kemampuan yang diuji	Prop	Nas	Peringkat
10	Tajuk	Menentukan gagasan utama suatu tajuk	47,11	50,63	1
5	Paragraf	Menyusun kritikan berdasarkan bacaan	52,32	66,72	2
48	Kamus kecil	Menyusun kamus kecil dari beberapa kata	55,44	47,23	3
17	Majas pada puisi	Menentukan majas pada puisi	57,18	62,33	4
15	Peta	Menyusun pernyataan yang sesuai dengan isi peta	58,32	65,44	5
4	Kalimat fakta	Menentukan kalimat fakta pada paragraph	60,12	58,77	6
40	Karya ilmiah	Menyusun paragraf pengantar sesuai judul karya tulis	60,53	38,81	7
49	Kalimat efektif	Menyunting kalimat menjadi efektif	61,25	58,00	8
23	Konflik	Menentukan jenis konflik pada cerita	61,88	74,69	9
12	Kesimpulan tajuk	Menyimpulkan isi tajuk	63,48	57,67	10
7	Media	Menentukan perbedaan penyajian 2 teks berita	63,84	70,43	11
3	Kalimat pendapat	Menentukan kalimat pendapat	64,45	52,9	12

2. Tahun 2008

Pada butir-butir soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia, proporsi menjawab benar yang paling rendah adalah tema menentukan teks drama sesuai ilustrasi peristiwa, yaitu hanya sebesar 37,96. Untuk tema menentukan simpulan isi tajuk proporsi menjawab benarnya sebesar 38,47, untuk tema menentukan gagasan utama dalam tajuk proporsinya 38,76, untuk tema menentukan fakta dalam tajuk proporsinya 42,93, untuk tema menentukan informasi yang bertentangan proporsinya 44,77, untuk tema menentukan pernyataan yang sesuai dengan grafik proporsinya 45,49, untuk tema menentukan slogan sesuai ilustrasi proporsinya 48,51, untuk tema menentuka iklan baris sesuai ilustrasi proporsinya 49,81, untuk tema menentukan rumusan masalah berdasarkan latar belakang proporsinya 51,27, untuk tema menentukan amanat novel proporsinya 51,96, untuk tema menentukan konflik dalam kutipan

cerpen proporsinya 52,03, untuk tema menentukan laporan singkat sesuai ilustrasi proporsinya 53,65, untuk tema menentukan perbaikan kalimat yang sumbang dalam paragraf proporsinya 59,25, untuk tema menentukan cara penokohan kutipan cerpen proporsinya 61,06, dan untuk tema menentukan bukti watak tokoh dalam drama menempati proporsi menjawab benar yang paling tinggi, yaitu sebesar 62,83. Proporsi-proporsi tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Proporsi menjawab benar butir soal mapel Bahasa Indonesia UN 2008

No	Pb/spb/tema/sub	Kemampuan yang diuji	Prop	Nas	Peringkat
47-1	Menulis dariama	Menentukan teks dariama sesuai ilustrasi peristiwa	37,96	65,82	1
11-30	Simpulan tajuk	Menentukan simpulan isi tajuk	38,47	41,71	2
8-27	Tajuk	Menentukan gagasan utama dalam tajuk	38,76	37,54	3
9-28	Fakta dalam tajuk	Menentukan fakta dalam tajuk	42,93	55,58	4
6-17	Informasi	Menentukan informasi yang bertentangan	44,77	33,56	5
14-35	Grafik	Menentukan pernyataan yang sesuai dengan grafik	45,49	73,77	6
35-14	Slogan	Menentukan slogan sesuai ilustrasi	48,51	58,18	7
37-43	Iklan baris	Menentuka iklan baris sesuai ilustrasi	49,81	50,38	8
41-49	Karya ilmiah	Menentukan rumusan masalah berdasarkan latar belakang	51,27	40,64	9
22-41	Novel	Menentukan amanat novel	51,96	62,49	10
20-3	Cerpen	Menentukan konflik dalam kutipan cerpen	52,03	48,8	11
32-46	Laporan	Menentukan laporan singkat sesuai ilustrasi	53,65	59,38	12
50-23	Menyunting	Menentukan perbaikan kalimat yang sumbang dalam paragraf	59,25	46,09	13
18-6	Cerpen	Menentukan cara penokohan kutipan cerpen	61,06	52,92	14
25-15	Dariama	Menentukan bukti watak tokoh dalam dariama	62,83	74,21	15

3. Tahun 2009

Pada butir-butir soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia, proporsi menjawab benar yang paling rendah adalah untuk tema menentukan perbedaan karakteristik kedua kutipan novel, yaitu hanya sebesar 24,01. Selanjutnya, untuk tema menentukan slogan yang tepat sesuai ilustrasi kegiatan, proporsi menjawab benarnya adalah sebesar 45,55, untuk tema menentukan keberpihakan penulis dalam tajuk dengan konteks Indonesia proporsinya 46,98, untuk tema menentukan isi pesan singkat yang sesuai dengan ilustrasi kegiatan sekolah proporsinya 49,65, untuk tema menentukan kalimat utama dari paragraf proporsinya 53,07, untuk tema melengkapi puisi yang belum lengkap pada larik tertentu dengan larik bermajas tertentu proporsinya 53,65, untuk tema menyusun beberapa kalimat laporan yang belum tersusun secara padu dengan tepat proporsinya 54,69, untuk tema menentukan rangkuman yang tepat terhadap isi kutipan bacaan yang terdiri atas dua paragraf proporsinya 57,73, untuk tema menentukan watak tokoh pada kutipan novel proporsinya 58,68, untuk tema menentukan gagasan utama tajuk dengan konteks Indonesia proporsinya 62,46, untuk tema menentukan simpulan isi tajuk dengan konteks Indonesia proporsinya 63,12, dan untuk tema menentukan perbedaan penyajian kedua kutipan berita menempati proporsi menjawab benar paling tinggi, yaitu sebesar 63,19. Proporsi-proporsi tersebut disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Proporsi menjawab benar butir soal mapel Bahasa Indonesia UN 2009

No soal	Kemampuan yang diuji	Prop	Nas	Peringkat
40-37	Menentukan perbedaan karakteristik kedua kutipan novel	24,01	64,45	1
24-35	Menentukan slogan yang tepat sesuai ilustrasi kegiatan	45,55	68,02	2
11-3	Menentukan keberpihakan penulis dalam tajuk dengan konteks Indonesia	46,98	74,64	3
17-28	Menentukan isi pesan singkat yang sesuai dengan ilustrasi kegiatan sekolah	49,65	75,65	4
1-8	Menentukan kalimat utama dari paragraph	53,07	73,36	5
47-58	Melengkapi puisi yang belum lengkap pada larik tertentu dengan larik bermajas tertentu	53,65	64,64	6
19-30	Menyusun beberapa kalimat laporan yang belun tersusun secara padu dengan tepat	54,69	75,85	7

25-36	Menentukan rangkuman yang tepat terhadap isi kutipan bacaan yang terdiri atas dua paragraf	57,73	52,11	8
42-39	Menentukan watak tokoh pada kutipan novel	58,68	66,22	9
9-1	Menentukan gagasan utama tajuk dengan konteks Indonesia	62,46	82,1	10
12-4	Menentukan simpulan isi tajuk dengan konteks Indonesia	63,12	75,25	11
5-12	Menentukan perbedaan penyajian kedua kutipan berita	63,19	60,88	12

B. Perbandingan Materi Sulit UN antar Kabupaten

1. UN Tahun 2008

Perbandingan materi sulit UN tahun 2008 antar kabupaten untuk masing-masing mata ujian dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perbandingan Materi Sulit antar Kabupaten untuk Soal UN tahun 2008

Nama Kota/Kabupaten	Bahasa Indonesia	
	Banyaknya Butir	Persen
Kota Yogya	13	26,00
Sleman	15	30,00
Kulonprogo	15	30,00
Bantul	17	34,00
Gunungkidul	13	26,00

Untuk UN tahun 2008, materi sulit pada mata pelajaran bahasa Indonesia berkisar antara 13-17 butir, atau berkisar antara 26-34 persen dari keseluruhan butir soal yang berjumlah 50 butir. Kesulitan yang paling sedikit terjadi di kota Yogyakarta dan kabupaten Gunung Kidul, sedangkan kesulitan yang paling banyak dialami oleh siswa di kabupaten Bantul. Dilihat dari proporsi siswa yang menjawab benar, maka pada mata pelajaran bahasa Indonesia, hanya terdapat 6 tema yang capaiannya sedikit di atas rata-rata nasional, yaitu untuk tema: menentukan gagasan utama dalam tajuk, menentukan informasi yang bertentangan, menentukan rumusan masalah berdasarkan latar belakang suatu karya ilmiah, menentukan konflik dalam kutipan cerpen, menentukan perbaikan kalimat yang sumbang dalam paragraf, dan menentukan cara penokohan dalam kutipan cerpen.

2. UN Tahun 2009

Perbandingan materi sulit UN tahun 2009 antar kabupaten untuk masing-masing mata ujian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Materi Sulit UN tahun 2009 antar Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota	Bhs Indonesia	
	Banyaknya Butir	Persen
Kota Yogya	8	16,00
Sleman	11	22,00
Kulonprogo	12	24,00
Bantul	13	26,00
Gunungkidul	12	24,00

Materi sulit pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk UN tahun 2009 berkisar antara 8-13 butir, atau berkisar antara 16-26 persen dari keseluruhan butir soal yang berjumlah 50 butir. Kesulitan yang paling sedikit terjadi di kota Yogyakarta, sedangkan kesulitan yang paling banyak dialami oleh siswa di kabupaten Bantul. Dilihat dari proporsi siswa yang menjawab benar, maka pada mata pelajaran bahasa Indonesia, hanya terdapat 2 tema yang capaiannya sedikit di atas rata-rata nasional, yaitu untuk tema: menentukan rangkuman yang tepat terhadap isi kutipan bacaan yang terdiri atas dua paragraf, dan menentukan perbedaan dari penyajian kedua kutipan berita. Selain itu, untuk materi-materi sulit yang peringkatnya atas, hasil capaian rata-rata siswa di D.I. Yogyakarta adalah jauh di bawah capaian rata-rata nasional.

C. Perbandingan Materi Sulit UN antar Tahun

Perbandingan materi sulit UN antar tahun untuk masing-masing mata ujian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perbandingan Materi Sulit UN Antar Tahun

Tahun	Bhs Indonesia	
	Banyaknya Butir	Persentase
2007	12	24,00
2008	15	30,00
2009	12	24,00

Jika dilihat berdasarkan banyaknya materi yang sulit selama 3 tahun, yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009, dapat diperoleh informasi bahwa dari tahun ke tahun materi sulit untuk semua mata pelajaran yang di-UN-kan tidaklah sama. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, materi sulit tahun 2008 lebih banyak jika dibandingkan materi sulit UN tahun 2007 dan 2009.

Dengan asumsi tingkat kemampuan siswa peserta UN dari tahun ke tahun sama, maka dilihat dari banyaknya materi sulit UN selama 3 tahun, nampak bahwa secara umum materi sulit UN tahun 2008 adalah jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan materi UN tahun 2007 dan 2009. Jika dilihat materi sulit tiap mata pelajaran dari tahun ke tahun, maka dapat diperoleh informasi bahwa untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi untuk menentukan gagasan utama dari suatu tajuk merupakan salah satu materi sulit yang dialami oleh siswa dari tahun ke tahun, baik UN tahun 2007 (materi paling sulit), UN tahun 2008 (materi sulit ke-3), maupun pada UN tahun 2009 (materi sulit ke-3).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data, interpretasi dan pembahasannya, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Materi paling sulit dari tahun-ke tahun untuk bahasa Indonesia yakni menentukan gagasan utama dari suatu tajuk.
2. Ada perbedaan jumlah materi sulit dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ditinjau dari 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di Yogyakarta dengan urutan dimulai yang paling banyak sampai yang paling sedikit, yaitu: Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
3. Dengan asumsi tingkat kemampuan siswa peserta UN dari tahun ke tahun sama, maka dilihat dari banyaknya materi sulit UN selama 3 tahun, tampak bahwa jumlah materi sulit UN tahun 2008 adalah jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan materi sulit pada tahun 2007 dan tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan sebagai berikut. Mengingat ada berbagai materi sulit yang sama dari tahun ke tahun, perlu suatu upaya perbaikan, salah satu diantaranya dalam bentuk pelatihan penguasaan

materi pelajaran kepada guru yang sekolahnya mengalami masalah persentase daya serapnya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Diranna, Kathryn, dkk. (2008). *Assessment-centered teaching*. London: SAGE, Ltd
- Djemari Mardapi. (2008). *Teknik penyusunan instrumen: tes dan nontes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia.
- Ladd, H.F. dan Fiske, E.B. 2003. Does competition improve teaching and learning?: Evidence from New Zealand. *Educational evaluation and policy analysis*, Spring 2003, vol 25, No.1.
- LeTendre, G.K., Hofer, B.K., dan Shimizu. 2003. What is tracking?. Cultural expectations in United States, Germany, and Japan. *American Educational Research Journal*, Spring 2003, Vol. 40, No. 1.
- Nitko, AJ. 1996. *Penilaian berkelanjutan berdasarkan kurikulum (PB2K): Kerangka, konsep, prosedur, dan kebijakan* (terj. AM Ahmad) Jakarta: Pusat Pengembangan Agibisnis.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang: *Standar Nasional Pendidikan*
- Permendiknas RI No. 39 Tahun 2007 tentang: *Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2007*
- Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Puspendik. 2007. *Buletin Puspendik*. Jakarta: Puspendik
- Safari. 2008. Materi sulit bagi siswa SMP NAD. *Buletin*. Jakarta: Puspendik
- Umar, J. 2000. Ujian Akhir Sebagai Subsystem Pendidikan Dalam Rangka Pengendalian Mutu. *Makalah*. Disampaikan pada seminar Ujian Akhir Nasional, 29 Agustus 2000, di Ruang Graha Depdiknas Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ulrich, D. 1997. *Human Resource Champions*. Harvard : President and Fellows Harvard College.

